

ABSTRAK

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Daerah dituntut untuk memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas untuk mencapai tujuan Nasional ditingkat lokal. Dalam menjalankan urusan pemerintahannya Daerah dapat membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Dinas atau Badan Daerah. Kabupaten Karawang sendiri dalam membantu urusan pemerintahannya telah membuat SKPD berupa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang diharapkan dapat menggali sektor potensial untuk pembangunan, serta mencukupi kebutuhan yang telah disesuaikan dengan beban tugas yang diberikan saat ini.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menguraikan isi dokumen dan informasi-informasi untuk menggambarkan permasalahan yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang. Data yang digunakan di dalam menyusun penulisan hukum ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis yang dilakukan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas dan wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diatur berdasarkan peraturan Bupati Karawang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang. Sejauh ini upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang dalam meningkatkan Pendapatan Daerah yaitu dengan pengembangan sepenuhnya terhadap obyek-obyek wisata yang sudah memadai dari segi Aksesibilitas, Retribusi Perizinan, Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Kebutuhan Wisata, ataupun Sarana dan Prasarana yang sudah ada sebelumnya serta Pengembangan Kemitraan. Akan tetapi, dalam menjalankan kegiatannya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selalu dihadapkan dengan permasalahan yang sama dengan adanya faktor-faktor yang tidak mendukung seperti pentingnya pertanian di Kabupaten Karawang, karena luas lahan yang ada saat ini masih banyak berupa areal persawahan, pertumbuhan dan perkembangan pesat industri ditakutkan pariwisata yang ada saat ini akan bergeser, karena industri-industri yang ada dan yang akan ada membutuhkan lahan yang cukup besar. Disini pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pembatasan kawasan dan dalam menata kawasan Kabupaten Karawang, sebab permasalahan tersebut dapat menjadi penghalang dalam perkembangan pariwisata atau malah sebaliknya.

Dalam hasil penelitian ini jelaskan bahwa secara garis besar keuntungan dan manfaat berasal dari pendapatan penyelenggaraan pariwisata. Pendapatan tersebut secara langsung berasal dari belanja dan pengeluaran lainnya oleh wisatawan. Belanja wisatawan ini menjadikan ekonomi berputar secara berganda memberikan efek bagi bergerakaknya sektor-sektor lainnya yang terkait dengan pariwisata, sehingga apabila daya tarik ditingkatkan maka jumlah wisatawan yang datang akan bertambah, maka dari itu Dinas Pariwisata telah merencanakan pengembangan sarana dan prasarana demi kenyamanan dan keindahan serta daya tarik obyek wisata.

Kata Kunci: *Dinas Pariwisata, Peningkatan Pendapatan Daerah*